

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Celah dalam Penyusunan Anggaran Jakarta

P erencanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan. Sejumlah usul program dengan nilai anggaran yang tidak wajar langsung terungkap ketika pembahasan Rancangan APBD di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru memasuki tahap awal.

Gubernur DKI Anies Baswedan berdalih bahwa anggaran aneh-aneh itu bisa lolos akibat kelemahan sistem penganggaran elektronik (*e-budgeting*) yang tidak otomatis memverifikasi anggaran yang tidak wajar. Sedangkan anggota badan legislatif dan pengamat anggaran menduga program "siluman" itu masuk ketika penyusunan dan dokumen rencana anggaran tak bisa dipantau masyarakat.

Pemerintah DKI Jakarta menerapkan sistem *e-budgeting* sejak 2015, pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Sejak awal, penggunaan sistem *e-budgeting*, antara lain, ditujukan untuk mencegah masuknya anggaran "siluman", duplikasi mata anggaran, serta upaya mengutak-atik anggaran di tengah jalan oleh orang yang tidak berwenang.

Pada masa Gubernur Anies, sistem *e-budgeting* masih digunakan. Yang berbeda, pada era Basuki, semua dokumen rencana anggaran bisa dilihat masyarakat umum sejak awal penyusunan. Sedangkan pada era Anies, dokumen anggaran baru bisa dilihat masyarakat umum setelah disetujui pemerintah dan DPRD.

### Tahapan Penyusunan APBD DKI Jakarta

1. Rembuk rukun warga
2. Input data rencana kerja oleh perangkat daerah
3. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat:
  - Kelurahan
  - Kecamatan
    - » Dimulai input pengajuan program dan anggaran pada sistem *e-budgeting* non-online.
  - Tingkat kota/kabupaten
    - » Usul dari kecamatan dibahas. Setelah disetujui, datanya kemudian diunggah ke *e-budgeting online* sebagai daftar pengajuan program dan anggaran unit/suku dinas.
  - Tingkat provinsi
    - » Usul program dan anggaran kota/kabupaten dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diverifikasi.
    - » Dari Bappeda, usul program dan anggaran dibawa ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
    - » Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mendapat nomor rekening untuk pengajuan program dan anggarannya.
    - » BPKAD memastikan program yang diajukan oleh SKPD tersedia anggarannya.

» Dari BPKAD, rancangan anggaran dalam format *e-budgeting* diserahkan ke Gubernur untuk diperiksa. Bila Gubernur setuju, rancangan APBD *e-budgeting* akan dikunci BPKAD atas perintah Gubernur.

### Pemilik Akses Setelah E-Budgeting Dikunci

Setelah dikunci, hanya pejabat tertentu yang diberi kata kunci untuk mengisi/mengubah dokumen *e-budgeting*. Mereka adalah:

- Kepala BPKAD
- Kepala Bappeda
- Sekretaris Daerah
- Gubernur
- Pejabat SKPD (hanya bisa melihat anggaran yang mereka ajukan, tapi tidak bisa mengubahnya lagi)

4. Penerbitan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pedoman untuk Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
5. Penyampaian Rancangan KUA-PPAS ke DPRD
6. Pembahasan dan kesepakatan KUA-PPAS antara eksekutif dan legislatif
7. Penerbitan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA
8. Memasukkan data RKA
9. Penyampaian Raperda tentang (APBD) ke DPRD
10. Persetujuan Raperda APBD di DPRD
11. Pengiriman dokumen Raperda APBD ke Kementerian Dalam Negeri
12. Kementerian Dalam Negeri mengirim hasil evaluasi Raperda APBD
13. Penetapan Peraturan Daerah APBD

### Perbedaan Dua Era

#### Era Basuki Tjahaja Purnama

Seluruh data anggaran yang masuk ke RKPD, KUA-PPAS, RKA, dan RAPBD ditampilkan secara terbuka di *website resmi apbd.dkijakarta.go.id*.

#### Era Anies Baswedan

Data KUA-PPAS, RKA, RAPBD, dan APBD baru ditayangkan di *website resmi* setelah disepakati dengan DPRD.